



Jaringan Penolakan Industri Tambang di Pegunungan Kendeng Utara

Maksum Syam

Sekolah Kaji Tindak November 2015 – Januari 2016

Daftar Isi

Pendahuluan	2
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)	3
Framing dalam Jaringan Penolakan Tambang	4
Karakteristik Gerakan JMPPK	11
Pembentukan Identitas Kolektif	12
Konsekuensi Relasi Struktural	13
Penutup	15
Daftar Pustaka	17

Tulisan ini menyinggung soal jaringan penolakan terhadap perusahaan tambang di Pegunungan Kendeng Utara, yang terdiri dari beragam aktor dengan latar yang berbeda. Berbagai kajian sebelumnya tentang gerakan perlawanan terhadap perusahaan tambang hanya menguraikan kontribusi beragam aktor terhadap gerakan sosial. Penting untuk memahami pola keterhubungan beragam aktor baik di tingkat lokal maupun nasional, sekaligus keterbentukan identitas kolektif dalam mencapai tujuan bersama.

Pendahuluan

Pada masa Reformasi, melalui Keputusan Menteri Nomor 1453 K/29/MEM/2000 yang membolehkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan, pemerintah daerah memanfaatkannya untuk berkolaborasi dengan pengusaha tambang. Di berbagai wilayah Indonesia, selain adanya pengabaian terhadap kerusakan lingkungan (Puspitasari 2010; Yuwono 2010; Regus 2011; Maimunah 2014; Frasetiandy 2014), kolaborasi kuasa antara pemerintah daerah dan pengusaha tambang memarginalisasi kalangan petani yang dirugikan oleh industri penambangan (Idhom 2009; Regus 2011; Jati 2013; Maimunah 2014; Cahyati 2014; Arofat 2016).

Jaringan penolakan terhadap perusahaan tambang, serta berbagai komponen yang membentuk dan memungkinkannya semakin membesar, belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya tentang jaringan penolakan tambang cenderung hanya mengulas beragam aktor yang membantu petani dalam menolak perusahaan tambang (Kuswardono 2014, Cahyati 2014; Dewi 2015; dan Oktaviana 2015). Sedangkan peran, kontribusi, pola relasi yang terbentuk di antara beragam aktor, seperti akademisi, aktivis NGO, tokoh agama, dan bahkan selebriti, dalam pengembangan strategi penolakan tambang, beserta konsekuensi positif dan negatifnya, belum ada yang melakukan kajian secara menyeluruh.

Dalam kasus gerakan penolakan tambang di Pegunungan Kendeng Utara, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang melibatkan petani, masyarakat adat (Komunitas Sedulur Sikep), akademisi dan aktivis lingkungan, melakukan mobilisasi dukungan baik melalui media sosial seperti facebook, twitter dan youtube, yang menghadirkan figur petani sebagai korban penambangan, maupun safari politik oleh ibu-ibu petani ke berbagai lembaga pemerintahan dan universitas di Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Sehingga beragam aktor pun terlibat dalam jaringan penolakan tambang di Pegunungan Kendeng Utara, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan jaringan penolakan berdasarkan bidangnya masing-masing. Meski aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan penolakan tambang sangat beragam, namun mereka sama-sama menentang kesewenang-wenangan kolaborasi pemerintah daerah dan pengusaha tambang yang secara sepihak menetapkan rencana penambangan dan mengeksklusi petani lokal.

Mengacu pada kerangka konsep yang dikembangkan oleh Benford dan Snow (2000), tulisan ini akan mengurai proses perluasan jaringan penolakan terhadap perusahaan tambang, serta pola relasi yang terbentuk antara petani dan beragam aktor yang terlibat dalam jaringan penolakan tambang. Selain itu, juga menguji berbagai komponen yang memungkinkan terbentuk dan berkembangnya jaringan sosial, sebagaimana yang diajukan oleh Diani (1992). Oleh karena itu, melalui studi kasus terhadap perkembangan jaringan penolakan tambang yang dipelopori oleh Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), penelitian ini berupaya mengungkap berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif, dari berbagai strategi advokasi yang dikembangkan oleh JMPPK dan beragam jejaring sosial, seperti aksi kolektif, intervensi kebijakan, dan penggalangan dukungan melalui media sosial, dalam rangka menyukseskan penolakan terhadap perusahaan semen dan rencana penambangan karst di Pegunungan Kendeng Utara.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)

Salah satu jaringan terbesar yang menolak penambangan di Pegunungan Kendeng Utara adalah Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), yang secara resmi didirikan pada Maret 2008 di Kecamatan Sukolilo (Hapsari 2016). Jaringan penolakan tambang ini memiliki keanggotaan yang cair dan tidak mengikat, yang awalnya terdiri para petani di sepanjang Pegunungan Kendeng Utara, kemudian berhasil memperluas jaringan dukungan dari berbagai lembaga dan organisasi sosial, serta kalangan kelas menengah perkotaan. Meski demikian JMPPK memiliki koordinator di masing-masing desa yang terdampak langsung oleh rencana penambangan batu karst di Pegunungan Kendeng Utara, serta beberapa akademisi, aktivis NGO, dan aktor individual yang selalu membantu gerakan penolakan tambang di tingkat nasional.

JMPPK Pati memiliki dua omah yang digunakan sebagai pusat kegiatan, yaitu Omah Kendeng dan Omah Sonokeling. Omah Kendeng dibangun di Dukuh Ledok, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo pada akhir tahun 2008. Omah Kendeng menjadi pusat kegiatan JMPPK seperti mengadakan rapat dan mengkampanyekan gerakan, tetapi juga menjadi tempat pelatihan dan pagelaran seni dan budaya, seperti pelatihan musik gamelan bagi anak-anak JMPPK setiap hari Kamis. Tidak seperti sekolah formal yang memberikan semua mata pelajaran, pembelajaran bagi anak-anak JMPPK di Omah Kendeng selalu berkaitan dengan apa yang dibutuhkan di sekitar mereka (Wawancara dengan NNG, 9 Desember 2015). Selain itu, di sekitar Omah Kendeng, terdapat lebih dari 200 kendi dan diberi nama yang sama dengan beberapa sumber air di sekitar Pegunungan Kendeng Utara sebagai simbol kepedulian terhadap terpeliharanya sumber air.

Sedangkan Omah Sonokeling dibangun di area Bumi Perkemahan Sonokeling milik Perhutani, pada tahun 2013. Area pegunungan di belakang Omah Sonokeling berupa batuan-batuan padas yang gundul dan berpotensi longsor, sehingga JMPPK berinisiatif mengajak Perhutani untuk bekerja sama dalam rangka melestarikan pegunungan.

Akhirnya, Perhutani memberikan izin kepada JMPPK untuk mendirikan Omah Sonokeling sekaligus mengelola lahan seluas 32 hektar untuk dilestarikan kembali (Wawancara dengan PNT, 3 Desember 2015). Selain menjadi pusat informasi tentang perkembangan gerakan penolakan tambang, Omah Sonokeling juga menjadi pusat penyelenggaraan rapat tentang segala hal yang berkaitan dengan JMPPK. Pada tanggal 3 Desember 2015, JMPPK menyelenggarakan rapat untuk membahas rencana kerja pengelolaan Bumi Perkemahan Sonokeling, seperti pembangunan jalan masuk menuju Omah Sonokeling, pagar, lampu jalan, dari persoalan teknis, bahan-bahan yang dibutuhkan, hingga pendanaan. Sebelumnya, JMPPK memang sering mengadakan kegiatan dan acara di Bumi Perkemahan Sonokeling.

Framing dalam Jaringan Penolakan Tambang

Diagnostic Framing

“Diagnostic Framing”, suatu proses mengidentifikasi situasi problematik yang dipandang perlu diupayakan perubahan. Dalam proses identifikasi situasi ini gerakan sosial juga menetapkan berbagai sumber persoalan atau aktor (antagonis) yang bertanggung jawab atas situasi yang dipermasalahkan (Benford dan Snow 2000: 616). Dalam kasus penolakan tambang yang dilakukan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), pada awalnya warga belum menyadari dampak dari rencana penambangan PT Semen Gresik (yang kemudian berubah menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia pada akhir tahun 2012). Sebab, selain sosialisasi pembangunan pabrik semen masih sangat terbatas di kalangan pemerintahan daerah, warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani juga belum tahu secara utuh tentang proses penambangan dan dampaknya terhadap pertanian.

Namun, beberapa tokoh lokal, misalnya GRO yang memiliki hubungan baik dengan berbagai akademisi dan aktivis NGO, mengawali obrolan tentang dampak penambangan saat menghadiri Paguyuban Kadang Sikep, serta terus melanjutkan pengorganisasian warga untuk meninjau proses penambangan yang dilakukan PT Semen Gresik di Tuban, mewawancarai warga Tuban yang terdampak penambangan serta mendokumentasikan ke dalam bentuk video untuk ditunjukkan ke warga lainnya di Kecamatan Sukulilo. Sehingga banyak warga yang penasaran untuk menonton pemutaran video tersebut. Salah satu kordinator JMPPK (SPR) mengungkapkan bahwa dia pernah melakukan pemutaran video yang ditonton sekitar 500 warga di halaman rumahnya. Menurut SPR, studi banding ke Tuban dan pemutaran film ini sangat penting untuk menggugah kesadaran warga tentang adanya ancaman penambangan terhadap pertanian (Wawancara dengan SPR, 6 September 2015).

GRO adalah tokoh komunitas Sedulur Sikep yang pertama kali menginformasikan sekaligus mempelopori gerakan penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu kapur oleh PT Semen Gresik. Sedangkan SPR merupakan

salah satu penggerak pertama penolakan terhadap perusahaan tambang yang berencana melakukan penambangan di Kecamatan Sukolilo. SPR merupakan tokoh lokal yang cenderung disegani oleh tetangganya. Misalnya, warga menunjuknya sebagai ketua mesjid meski bukan termasuk muslim yang taat. Selain itu, SPR juga sering menjadi sandaran warga untuk berkonsultasi dan dipercaya untuk mengatasi berbagai persoalan di desanya.

Keterlibatan SPR dalam menggerakkan warga untuk menolak penambangan dilatari oleh pengalamannya ketika merantau dan menyaksikan kerusakan pertanian akibat penambangan, misalnya polusi kimia dari tambang nikel yang mencemari perkebunan kopi di daerah Sumatera (Wawancara dengan SPR, 6 September 2015). Selain itu, meski beragama Islam, SPR juga mengaku bahwa dia mengagumi dan juga memegang prinsip yang sama dengan Komunitas Sedulur Sikep, terutama dalam aspek kejujuran. Komunitas Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo memang memiliki kedekatan relasi dengan kalangan petani muslim. GRO sebagai tokoh Sedulur Sikep sering membantu kelompok petani lainnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian (Wawancara dengan GRO, 29 Desember 2015). Oleh karena itu, GRO dan GRI sebagai tokoh utama yang pertama kali memobilisasi gerakan penolakan terhadap rencana penambangan tidak kesulitan mengajak warga dari desa lainya untuk mengidentifikasi adanya acaman penambangan terhadap sumber air dan pertanian warga.

Setelah menyaksikan dampak penambangan melalui pemutaran video, banyak warga Kecamatan Sukolilo bergabung dalam JMPPK untuk menolak rencana pembangunan pabrik semen, meski awalnya kalangan penolak sering diintimidasi oleh aparat kelurahan dan polisi (Wawancara dengan DRT 5 Desember 2015). Namun, pengalaman warga tentang kejadian banjir bandang juga berkontribusi pada pembentukan sikap penolakan terhadap penambangan. Semakin berkurangnya pepohonan di pegunungan menyebabkan hilangnya serapan air hujan, sehingga air menggelontor turun ke daerah Kecamatan Sukolilo (Wawancara dengan DRT 5 Desember 2015). Beberapa warga dari kecamatan lain yang terkena banjir, seperti Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, juga pernah mendatangi tokoh JMPPK untuk memberikan dukungan terhadap gerakan penolakan perusahaan tambang (Kompas, 17 Juli 2008).

Selain pengorganisasi petani untuk mencari tahu tentang dampak penambangan, JMPPK juga bekerja sama dengan akademisi dan berbagai organisasi lingkungan untuk memperluas wawasan tentang kondisi pegunungan dan pertanian. Misalnya, pada tanggal 16-19 Juni 2008, Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN Veteran Yogyakarta melakukan kegiatan penguatan kapasitas terhadap warga dalam rangka memberikan pemahaman secara utuh tentang kondisi karst dan fungsinya terhadap pertanian (Dewi, 2015), sehingga anggota JMPPK semakin menyadari pentingnya melindungi kawasan karst demi keberlangsungan pertanian, yang terancam rusak oleh praktik penambangan.

Sementara pembuktian empiris terus digalang oleh JMPPK, beberapa warga Kecamatan Sukolilo juga meneguhkan pendirian melalui penanda supra-rasional. Misalnya, Gua Sumber Wareh tidak pernah mengalami kering walaupun di musim kemarau, namun pernah suatu ketika air di Sumber Wareh berhenti mengalir sekitar satu jam lalu mengalir kembali. Kemudian warga mempersepsikannya sebagai penanda akan datangnya ancaman terhadap sumber air (Wawancara dengan DRT, 5 Desember 2015). Seiring dengan semakin kuatnya penolakan JMPPK, beberapa cerita mistis pegunungan dari masa lalu pun turut tersebar, seperti naga putih sebagai penjaga pegunungan yang akan marah jika pegunungan ditambang (Wawancara dengan SYN, 3 Desember 2015). Oleh karena itu, sebagian anggota JMPPK tidak hanya memosisikan diri sebagai petani yang terancam penambangan, tetapi juga sebagai pelindung Pegunungan Kendeng Utara. *"Ibu Bumi telah merawat dan memelihara kami, jangan membuat ibu bumi kami marah,"* (Pernyataan SKN terhadap Komisaris PT SI, 17 Desember 2015). Akhirnya, meski para anggota JMPPK memiliki perbedaan identitas, misalnya Komunitas Sedulur Sikep dan warga muslim, namun mereka membentuk identitas kolektif sebagai pelindung Pegunungan Kendeng Utara dari ancaman penambangan yang akan merusak sumber air dan lahan pertanian.

Dengan demikian, JMPPK mengidentifikasi pertambangan sebagai musuh pertanian dan pegunungan. Sementara Pemerintah Kabupaten Pati yang memberikan perizinan terhadap perusahaan tambang dipandang sebagai sumber persoalan karena mengabaikan keberlangsungan pertanian. Para akademisi dan aktivis NGO yang terlibat dalam jaringan penolakan tambang juga mengidentifikasi kesewenang-wenangan pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pengusaha tambang serta menyingkirkan kepentingan petani lokal. Pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam mengatur pemanfaatan lahan dipandang bermasalah karena tidak berpihak pada warga yang mayoritasnya adalah petani. Sehingga JMPPK memutuskan untuk mengintervensi pembuatan kebijakan dalam upaya mengagalkan perizinan yang diberikan pemerintah daerah terhadap perusahaan tambang. Melalui *Diagnostic Framing*, kolaborasi pemerintah daerah dan pengusaha tambang ditetapkan sebagai musuh bersama yang perlu dilawan dengan berbagai cara, baik melalui jalur hukum maupun melalui intervensi politik. Namun, intervensi kebijakan ini memerlukan bantuan dari berbagai akademisi yang memiliki keahlian untuk mematahkan argumentasi perusahaan tambang. Sehingga JMPPK pun meminta bantuan dari berbagai akademisi dan aktivis NGO di tingkat nasional yang memang sudah lama berelasi dan bekerja sama dalam mengatasi persoalan pertanian.

Prognostic Framing

Prognostic Framing merupakan proses penemuan solusi terhadap persoalan yang telah diidentifikasi, serta pembagian peran dan penetapan berbagai strategi untuk mencapai tujuan gerakan sosial (Benford dan Snow 2000: 616). Setelah mengidentifikasi kolaborasi

pemerintah daerah dan pengusaha tambang sebagai musuh bersama, JMPPK menetapkan berbagai strategi pengembangan gerakan penolakan tambang tidak hanya melalui gugatan hukum tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik yang dipandang tidak berpihak terhadap petani. Pembagian peran dan tugas pun dilakukan, meski bersifat informal dan tidak mengikat, berdasarkan keahlian masing-masing, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain sebagai pelopor gerakan penolakan tambang, GRO dan GRI menjadi tokoh kunci dalam mengorganisir jaringan penolakan terhadap perusahaan semen, yang terdiri dari beragam kalangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Secara garis besar, strategi penolakan tambang di Pegunungan Kendeng Utara dapat dikelompokkan dalam tiga hal:

a. Konsolidasi Lokal

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, GRO merupakan aktor utama di JMPPK yang berperan sebagai mediator antara warga penolak tambang di tingkat lokal dan berbagai aliansinya di tingkat nasional, baik akademisi maupun aktivis NGO. Di tingkat lokal, JMPPK memiliki kordinator di setiap desa yang terdampak penambangan (Wawancara dengan GRO, 8 Desember 2015). Para koordinator inilah yang berperan menyebarkan informasi tentang perkembangan dan strategi gerakan penolakan tambang ke semua anggota JMPPK. Setelah GRO menyerap informasi dari berbagai akademisi dan aktivis NGO di tingkat nasional, GRO membahas informasi tersebut bersama para koordinator desa serta menentukan strategi gerakan yang akan dijalani, lalu koordinator desa mengomunikasikan hasil kesepakatan dengan para anggota JMPPK di desanya masing-masing.

Di Desa Kedumulyo, DRT sebagai koordinator JMPPK menyebarkan informasi yang terkait strategi gerakan penolakan tambang melalui perkumpulan ibu-ibu Simbar Wareh untuk dilanjutkan ke anggota keluarganya yang lain (Wawancara dengan DRT 5 Desember 2015). Ibu-ibu yang tergabung dalam Komunitas Simbar Wareh mengadakan pertemuan setiap malam Jumat, yang diisi dengan acara tahlilan dan arisan. Anggota yang mendapat arisan menyumbangkan sebagian uangnya untuk pendanaan JMPPK. Dengan adanya perkumpulan Komunitas Simbar Wareh, DRT mudah menyebarkan informasi karena banyak suami ibu-ibu itu yang sibuk bekerja dan sulit dihubungi.

Artinya, meski keanggotaan JMPPK sangat cair dan tidak mengikat, namun para anggota tetap menjaga intensitas pertemuan dalam relasi informal. Komunitas Simbar Wareh menjadi salah satu unsur dalam JMPPK yang berperan sebagai wadah untuk bertukar informasi dan menempa identitas kolektif. Selain itu, dalam komunitas Simbar Wareh, yang awalnya hanya GRI yang berperan aktif dalam memobilisasi ibu-ibu untuk terlibat aktif dalam gerakan penolakan tambang, namun lambat laun terdapat beberapa ibu-ibu yang menggantikan peran GRI dalam memobilisasi anggota lainnya di desanya masing-masing. Begitu pula di Rembang,

GRI selalu menjaga komunikasi dengan SKN sebagai tokoh perempuan yang menggalang penolakan terhadap pembangunan pabrik semen oleh PT SI di Rembang (Wawancara dengan GRI, 11 Juni 2016).

Selain berkontribusi pada pendanaan JMPPK melalui arisan ibu-ibu, komunitas Sibar Wareh juga mengembangkan produksi jamu yang dijual melalui aliansi jaringan gerakan penolakan tambang, baik di tingkat lokal maupun nasional, dan hasil penjualan juga disumbangkan untuk pendanaan JMPPK. Misalnya, GRI pernah diundang sebagai pembicara di Sajogyo Institute Bogor, dan setelah acara menawarkan penjualan jamu untuk pendanaan JMPPK.

b. Intervensi Kebijakan

Dalam melakukan gugatan hukum, JMPPK dibantu Tim Advokasi Peduli Lingkungan yang terdiri dari WALHI dan LBH Semarang sebagai kuasa hukum warga penolak tambang. Meski demikian, berbagai pengacara NGO yang berlokasi di Jakarta, seperti HUMA, PILNET dan YLBHI, juga terlibat membantu JMPPK untuk melakukan kajian dan analisis hukum, sebelum diajukan ke pengadilan. Para pengacara tersebut sebelumnya memang memiliki pengalaman dengan komunitas Sedulur Sikep. Dalam proses pengadilan, gugatan hukum pernah dimenangkan oleh jaringan penolakan tambang di Pati saat Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh gugatan WALHI terhadap perizinan PT SI di Pati pada 27 Mei 2010. Sementara gugatan hukum terhadap perizinan PT SI di Rembang dan PT SMS di Pati masih dalam proses pengadilan. Sementara beberapa akademisi dari berbagai universitas, misalnya ETP dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta atau SAB dari Institute Pertanian Bogor, berperan menguatkan argumentasi tentang penolakan tambang.

Selain melakukan gugatan hukum, beberapa akademisi yang memiliki pengaruh atau posisi dalam lembaga pemerintahan juga berkontribusi melakukan intervensi kelembagaan untuk memperkuat posisi penolak tambang. Misalnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, yang memiliki kedekatan dengan akademisi IPB dan cenderung mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, pernah meminta data empiris dari kasus sengketa lahan rencana penambangan PT SI, sehingga dibuatlah dua tim lapangan, yaitu Tim Kebijakan dan Tim Perspektif masyarakat. Tim Kebijakan terdiri dari beberapa akademisi yang memiliki kedekatan dengan jaringan penolak tambang, sedangkan Tim Perspektif Masyarakat melibatkan peneliti dari Sajogyo Institute dan Serikat Hijau. Akhirnya, berdasarkan temuan dan rekomendasi dari kedua tim tersebut, Menteri Siti Nurbaya Bakar memutuskan tidak akan mengeluarkan surat tukar guling kehutanan sampai semua rekomendasi dari tim lapangan dipenuhi oleh PT SI, seperti dugaan korupsi yang perlu diperjelas, AMDAL yang perlu diperbaiki, dan sebagainya (Wawancara dengan EKC, 4 Oktober 2014).

Lebih lanjut, NGO yang terlibat dalam jaringan penolakan tambang juga berperan aktif membangun relasi dengan beberapa lembaga pemerintahan dalam rangka memastikan dilakukannya peninjauan terhadap berbagai persoalan perusahaan tambang. Misalnya, GRO meminta Direktur Sajogyo Institute untuk berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta memastikan dilakukannya penanganan terhadap persoalan korupsi terutama di kalangan pemerintah Kabupaten Pati, yaitu dalam aspek penyalahgunaan wewenang yang ditemukan oleh tim kebijakan (Wawancara dengan EKC, 4 Oktober 2014).

c. Aksi massa dan penggalangan dukungan

Di tingkat lokal, petani melakukan berbagai aksi kolektif. Setelah aksi penghadangan mobil PT SG yang dilakukan pertama kali secara spontan oleh ibu-ibu pada tanggal 22 Januari 2009, JMPPK Pati mulai melakukan berbagai konsolidasi untuk mengorganisir aksi bersama, seperti mendatangi kantor pemerintahan untuk melakukan protes. Dalam setiap persidangan, ribuan petani penolak tambang selalu mendatangi tempat persidangan untuk menunjukkan besarnya penolakan terhadap perusahaan tambang. Beberapa perwakilan penolak tambang pernah mendatangi Bupati Pati untuk melakukan audiensi yang diiringi aksi budaya di depan kantor Bupati Pati. Selain itu, berbagai acara penolakan juga sering dilakukan, misalnya JMPPK pernah menyelenggarakan pagelaran seni dan budaya di Bumi Perkemahan Sonokeling dengan tema penyelamatan Pegunungan Kendeng pada 19 Maret 2008, yang melibatkan berbagai kalangan. Sementara di Rembang, petani penolak mendirikan tenda penolakan yang dijaga bergiliran di tapak pembangunan pabrik untuk menunjukkan konsistensi penolakan terhadap PT SI.

Selain itu, beberapa aktor individual berperan memperluas wacana penolakan melalui media sosial, baik dari aktivis akar rumput maupun dari relawan individual. Sehingga informasi tentang penolakan tambang di Pegunungan Kendeng dapat cepat tersebar. Bahkan, seorang selebriti MLS berkontribusi memperluas dukungan melalui media sosialnya. Menurut MLS, para akademisi menjelaskan argumentasi penolakan tambang dengan bahasa yang rumit sehingga sulit dipahami oleh generasi muda, sementara dia yang lebih dikenal di kalangan generasi muda mampu berperan mempermudah bahasa akademisi untuk lebih dipahami dan menarik dukungan di kalangan generasi muda (Wawancara dengan MLS, 5 Oktober 2014)

Motivational Framing

Motivational Framing merupakan proses akhir yang menggerakkan berbagai aktor untuk melakukan tindakan kolektif. Dalam kasus jaringan penolakan tambang di Pegunungan Kendeng yang melibatkan beragam aktor, *Motivational Framing* yang menggerakkan aktor untuk terlibat atau mengambil peran dalam strategi penolakan tambang juga beragam. Petani lokal tergerak melakukan penolakan tambang karena terancam akan

rusaknya lahan pertanian, sementara aktivitas pertanian merupakan satu-satunya penghidupan yang layak dijalani dalam prinsip Komunitas Sedulur Sikep sebagai unsur utama yang berkontribusi besar dalam menggerakkan penolakan terhadap perusahaan tambang di Pati (Idhom 2009; Dewi 2015). Pengetahuan tentang penambangan karts yang berakibat pada rusaknya sumber air semakin meneguhkan para petani untuk menentang rencana penambangan di Pegunungan Kendeng Utara.

Beberapa Akademisi dan peneliti lingkungan mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya di bidang kajian lingkungan. *Motivational Framing* yang menggerakkan mereka lebih terfokus pada perlindungan keragaman hayati atau keberlangsungan ekosistem. Misalnya Kajian Yayasan Society for Health, Education, Environment, and Peace (SHEEP) Indonesia dan Indonesia Dragonfly Society (IDS) menemukan keragaman hayati di Kecamatan Tambakromo dan Kayen Kabupaten Pati yang perlu dilindungi, seperti 64 jenis burung, 55 jenis kupu-kupu, dan 32 jenis capung (Suciatingrum 2015). Peneliti biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menemukan sejenis kalacemeti baru dan tiga jenis kelelawar, yaitu *Miniopterus australis*, *Rhinolophus pusillus*, dan *Hipposideros larvatus* di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, yang menurutnya juga penting perlu dilindungi demi menjaga keberlangsungan hidup organisme lainnya (Tempo 2015). Meski memiliki fokus perhatian yang berbeda, namun petani lokal dan pemerhati lingkungan terhubung dalam gerakan penolakan terhadap perusahaan tambang. Kerusakan sumber air menjadi satu alasan yang mempertemukan petani lokal dan pemerhati lingkungan. Petani lokal berupaya melindungi lahan pertanian sebagai penghidupan, sementara pemerhati lingkungan berupaya melindungi keragaman hayati dan keberlangsungan ekosistem sebagai fokus kajian yang digelutinya.

Selain akademisi dan pemerhati lingkungan, beberapa akademisi yang memiliki posisi dalam struktur pemerintahan juga mengambil peran dalam mengadvokasi reformasi birokrasi dan kebijakan. Misalnya, adanya identifikasi tentang penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pembuatan AMDAL, yang kemudian melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (Wawancara dengan EKC, 4 Oktober 2016). Kajian yang dilakukan Komnas HAM menemukan adanya dampak negatif pabrik semen di Rembang terhadap hak kesehatan, hak lingkungan hidup, dan hak air (Apriando 2016). Begitu pula Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Achmad Santosa mendesak peninjauan kembali terhadap substansi perizinan pabrik semen kalau masih menimbulkan sengketa (Kompas, 12 Agustus 2014). Berbagai aktor dalam struktur pemerintahan berperan mengungkap berbagai persoalan dalam rencana pembangunan pabrik semen sesuai dengan fokus bidangnya masing-masing.

Berbeda dengan akademisi dan aktor pemerintahan yang menguatkan peran dalam bidangnya masing-masing, berbagai individu kelas menengah perkotaan tergerak memberikan dukungan terhadap petani penolak tambang, dan bahkan membantu penyebaran informasi penolakan tambang melalui media sosial, karena didasari rasa

simpati terhadap petani yang berjuang menolak perusahaan tambang. Dalam video “Samin vs Semen” yang diunggah di Youtube (2014), MLS menyatakan kagum terhadap ibu-ibu petani sebagai perempuan yang berjuang demi anak cucunya. Ketika ibu-ibu melakukan safari politik ke Jakarta, berbagai individu dari beragam kelompok sosial berdatangan ke tempat penginapan ibu-ibu di asrama Kontras Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap perjuangannya.

Karakteristik Gerakan JMPPK

Pengembangan Jejaring Informal

Keterhubungan beragam aktor dalam JMPPK lebih banyak bersifat personal. Melalui relasi informal, beragam aktor mampu terhubung secara intensif dan semakin memperluas cakupan jaringan penolakan tambang. Di tingkat lokal, meski mobilisasi awal dilakukan di paguyuban Kandang Sikep, namun GRO terus menghubungi berbagai kenalannya yang bisa diajak terlibat dalam gerakan penolakan tambang. Bahkan GRI tanpa lelah mengelilingi desa-desa di Kecamatan Sukolilo untuk mendiskusikan adanya rencana penambangan dengan orang-orang yang ditemuinya di jalan, hingga berhasil masuk ke berbagai perkumpulan perempuan muslim untuk mensosialisasikan adanya ancaman penambangan terhadap sumber air dan pertanian. Ketika ada ibu-ibu yang tertarik untuk mengetahui persoalan penambangan, GRI saling bertukar nomo HP dan terus menjaga komunikasi, termasuk dengan perempuan penolak tambang di Rembang. *“Saya keliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dan tukar nomer HP, selalu ngasih informasi.”* (Wawancara dengan GRI, 11 Juni 2016).

Kedekatan Komunitas Sedulur Sikep dengan beberapa akademisi yang sudah dianggap saudara juga membantu semakin meluasnya jaringan penolakan tambang ketika para akademisi tersebut mengajak beberapa pengurus NGO di tingkat Nasional untuk terlibat dalam gerakan JMPPK. Beberapa aktivis NGO yang memiliki pengalaman berelasi dengan Komunitas Sedulur Sikep juga cenderung memanfaatkan jejaring keorganisasiannya untuk berkontribusi pada pengembangan strategi gerakan JMPPK. Sementara GRO sebagai tokoh utama dalam JMPPK terus menjaga komunikasi dan menanyakan perkembangan persoalan penambangan di Pegunungan Kendeng Utara. Pembentukan jejaring informal antara tokoh JMPPK dan berbagai aktivis NGO di tingkat nasional dibenarkan oleh Koordinator Divisi Program Analisa Hukum dan Data di perkumpulan HUMA.

Keterlibatan berbagai aktor individual dalam gerakan penolakan tambang juga dilatari pengalaman personal dalam berelasi informal dengan komunitas Sedulur Sikep. Para aktor individual tersebut memberikan kontribusi pada pengembangan gerakan penolakan tambang sesuai bidang keahliannya masing-masing. Misalnya, EYN yang berprofesi sebagai *creative director* di perusahaan jasa periklanan, menyatakan bahwa keterlibatannya di JMPPK dilatari oleh pengalamannya yang sering berelasi dan

mempelajari ajaran kehidupan dari Komunitas Sedulur Sikep. “*Saya hanya sering menjadi teman ngobrol dan berdiskusi bagi sedulur-sedulur di JMPPK. Sebaliknya saya justru belajar banyak tentang kehidupan dari mereka.*” (Wawancara dengan EYN, 3 November 2016)

Melalui keterbentukan jejaring informal yang berlangsung secara intensif tersebut, gerakan sosial mampu menggalang keterlibatan aktor individual maupun organisasi untuk saling bertukar sumber daya dalam mengejar tujuan bersama, tanpa menghilangkan otonomi dan independensinya (della Porta dan Diani 2006: 21). Keberagaman aktor yang terlibat dalam JMPPK mampu saling memadukan keahlian untuk mengembangkan berbagai strategi gerakan penolakan terhadap rencana penambangan di Pegunungan Kendeng Utara. Keterpaduan beragam aktor tersebut dilatari oleh adanya tujuan bersama, yaitu menentang kesewenang-wenangan pemerintah daerah dan pengusaha tambang yang menyingkirkan kepentingan petani lokal.

Pembentukan Identitas Kolektif

Meski aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan penolakan tambang terdiri dari beragam identitas, seperti masyarakat adat, warga muslim, akademisi, pengacara, guru, peneliti, penulis, pelaku usaha periklanan, selebriti dan sebagainya, namun mereka tetap menjaga konsistensi dalam memberikan kontribusi sesuai keahliannya masing-masing pada pengembangan strategi penolakan tambang, setidaknya ketika dihubungi oleh GRO yang berperan sebagai pengorganisir gerakan sosial. Keterpaduan beragam aktor dari latar yang berbeda terbentuk melalui intensitas kebersamaan dalam menempa identitas kolektif. Di tingkat lokal, para anggota JMPPK tidak hanya digerakkan oleh keterancaman pertaniannya sendiri, tetapi sudah memosisikan diri sebagai pelindung Pegunungan Kendeng yang berjuang demi keberlangsungan kehidupan di sekitar Pegunungan Kendeng. Kebersamaan yang sudah terbangun lama di antara anggota JMPPK bahkan mendorong mereka untuk berkontribusi pada penguatan keorganisasian JMPPK, misalnya penyelenggaraan arisan untuk pendanaan JMPPK, dan sebagainya.

Begitu pula beragam aktor di tingkat nasional sering menjalin relasi dan berkomunikasi setidaknya dengan GRO sebagai tokoh utama yang selalu menjaga keberlangsungan jaringan penolakan tambang. Beberapa aktor memiliki pengalaman personal dan mengagumi ajaran-ajaran yang dimiliki komunitas Sedulur Sikep, serta menganggap dirinya sebagai bagian atau saudara (*sedulur*) dari komunitas Sedulur Sikep, sehingga ikut tergerak untuk membela komunitas Sedulur Sikep dari ancaman ekspansi industri penambangan (Wawancara dengan EYN, 3 November 2016). Sebagian aktor lainnya sudah lama kecewa dengan sistem politik yang ada di Indonesia, sehingga mereka juga tergerak membela petani lokal ketika mengetahui adanya kesewenang-wenangan pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pengusaha tambang dalam menyingkirkan kepentingan petani lokal. Adanya kesamaan tujuan dalam menentang

otoritas pemerintah daerah yang digunakan secara semena-mena itulah yang membuat aktor-aktor dalam jaringan penolakan tambang dapat menempa identitas kolektif.

Konsekuensi Relasi Struktural

Perluasan Kesempatan Politik

Para akademisi dan NGO memiliki peran signifikan dalam jaringan penolakan tambang di Pegunungan Kendeng Utara. Melalui bantuan akademisi dan NGO yang lebih memahami proses kebijakan penambangan, petani mampu melakukan gugatan hukum dan melakukan intervensi kebijakan. Berbagai aktivis NGO pula yang memediasi dan mendampingi petani untuk dapat terhubung dengan berbagai lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KOMNAS HAM, KPK dan sebagainya. Sehingga berbagai lembaga pemerintahan tersebut juga turut menyuarakan penolakan atau meminta peninjauan ulang terhadap rencana penambangan di Pegunungan Kendeng Utara sesuai dengan fokus bidangnya masing-masing.

Selain menjadi penghubung dengan lembaga pemerintahan, akademisi dan NGO juga menginisiasi penyelenggaraan seminar dan diskusi publik di berbagai kampus, seperti IPB, UI, UGM dan Unair, dengan menghadirkan perwakilan petani sebagai pembicara. Berbagai kelompok mahasiswa pun turut memberikan dukungan. Misalnya, ketika sekitar 70 ibu petani Rembang melakukan aksi unjuk rasa ke gedung Rektorat UGM pada 20 Maret 2015 terkait dua dosen UGM yang menjadi saksi ahli pendukung PT SI dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, puluhan mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM dan Komunitas Gusdurian Yogyakarta juga terlibat melakukan unjuk rasa (Khoemaeni 2015). Kemudian, pada 15 April 2015, Tim Independen yang dibentuk untuk mempelajari kesaksian kedua akademisi UGM tersebut mengadakan konferensi pers di gedung Rektorat UGM untuk menegaskan pemberian sanksi administratif secara kelembagaan dari UGM, dengan alasan bahwa kedua akademisi UGM tersebut tidak pernah melakukan penelitian langsung terhadap kondisi obyektif di wilayah Rembang (Rowiyan 2015).

Keterhubungan petani dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga keilmuan membuka peluang bagi petani penolak tambang untuk menguatkan posisinya dalam bernegosiasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan tambang. Karenanya, jaringan penolakan terhadap rencana penambangan di Pegunungan Kendeng Utara terus membangun relasi dengan berbagai lembaga pemerintahan dan keilmuan yang dipandang mampu melemahkan posisi perusahaan tambang dan para pendukungnya.

Terjebak dalam Pusaran Elitis

Meski jaringan penolakan tambang memberikan perluasan kesempatan politik, namun kapasitas petani penolak tambang dalam mengembangkan jejaring sosial dan menentukan strategi gerakan tidak sama. GRO menjadi tokoh sentral yang terhubung

dengan berbagai akademisi dan aktivis NGO di tingkat nasional dan pengatur strategi gerakan penolakan di tingkat lokal. GRO terus menjaga komunikasi dengan berbagai akademisi dan aktivis NGO untuk menyerap berbagai informasi dan masukan dalam pengembangan strategi penolakan terhadap perusahaan tambang (wawancara dengan EKC, 4 Oktober 2014). Selain berperan sebagai mediator, GRO merupakan tokoh karismatik yang dipercaya oleh anggota JMPPK yang lain untuk menentukan strategi gerakan penolakan tambang karena berkontribusi besar dalam membuka kesempatan politik di tingkat nasional, serta lebih mampu terhubung dengan berbagai kalangan akademisi yang berkontribusi menguatkan posisi tawar JMPPK dalam bernegosiasi di lembaga pemerintahan. Kharisma GRO itulah yang membuat pola kepemimpinan JMPPK nampak terpusat pada GRO (wawancara dengan SBR, 20 September 2016).

Namun, berbagai akademisi dan aktivis NGO di tingkat nasional lebih menfokuskan pada argumentasi dampak lingkungan (AMDAL). Pakar AMDAL dari IPB, yang juga termasuk salah satu aktor yang pertama kali menyukseskan pembentukan kebijakan AMDAL nasional, menyatakan bahwa dukungannya terhadap JMPPK disebabkan oleh AMDAL PT SI yang cacat, kalau tidak ada masalah dengan daya dukung lingkungan maka dia tidak akan terlibat dalam gerakan penolakan tambang (Wawancara dengan SAB, 7 Oktober 2016). Dalam menolak perizinan tambang, satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah menggugat AMDAL perusahaan tambang. Aktor yang dapat menggugat AMDAL hanyalah para akademisi lingkungan, sementara warga hanya menunggu hasil kajian AMDAL, sehingga warga tetap menjadi pasif dalam sistem politik nasional yang selalu bersifat *top-down*. Belum ada kebijakan nasional yang mengharuskan adanya keterlibatan warga secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ruang kehidupannya.

Beberapa petani penolak tambang tidak setuju dengan pola pengembangan strategi penolakan tambang yang seolah berpusat pada GRO. Sehingga beberapa petani yang awalnya terlibat dalam pendirian JMPPK justru memilih keluar dan membentuk organisasi pergerakan yang baru dengan nama Lingkar Kendeng Sejahtera (LIKRA) (Oktaviana 2015). Berdasarkan pengakuan GRO, alasan mereka memisahkan diri dari JMPPK dilatari oleh perbedaan pandangan dan penetapan strategi gerakan yang selalu melalui perantara GRO (Wawancara dengan GRO, 29 Desember 2015). LIKRA memiliki strategi tersendiri dan tidak suka kalau harus meminta persetujuan GRO. LIKRA membentuk aliansi tersendiri dengan berbagai kelompok penolak tambang lainnya, dengan nama Aliansi Ahli Waris Pegunungan Kendeng.

Aliansi Ahli Waris Pegunungan Kendeng terdiri dari berbagai kelompok penolak tambang, seperti LIKRA, FORMASI KEPAL, APPEL, GEMURANG, GPS, dan GASONG. Berbeda dengan JMPPK yang menggunakan strategi penolakan melalui jalur legal formal dan aksi massa yang bersifat "*soft*", Aliansi Ahli Waris Pegunungan Kendeng memandang bahwa jalur legal formal justru melemahkan gerakan tolak semen, serta

memilih menggunakan aksi kolektif yang lebih radikal, sebagaimana dibahas dalam diskusi dengan tema “Radikalisasi Gerakan Rakyat Kendeng Utara: Reportase Aksi Blokade Pantura Menolak Pabrik Semen” pada 6 Agustus 2015 (www.arahjuang.com, 28 September 2015).

Salah satu strategi penolakan tambang yang dilakukan Aliansi Ahli Waris Pegunungan Kendeng adalah aksi blokade ruas Pantura Pati-Kudus, bertepatan dengan arus balik lebaran pada 23 Juli 2015, yang melumpuhkan arus lalu lintas selama lima jam, sebagaimana dilansir dalam situs berita.suaramerdeka.com (2015). Sementara JMPPK menegaskan tidak terlibat sama sekali dalam bentuk aksi blokade jalur Pantura tersebut, sebab JMPPK mengutamakan cara damai (nir-kekerasan) dalam berbagai aksi penolakan tambang, sebagaimana diberitakan dalam situs jateng.tribunnews.com (2015).

Kalangan akademisi dan aktivis NGO tetap berjejaring dengan JMPPK karena mereka satu-satunya alat-taktis perjuangan yang diperankan oleh GRO. Karenanya, gerakan penolakan tambang berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, gerakan penolakan menggantungkan nasibnya dan mengikuti kepengaturan dari akademisi dan aktivis NGO yang lebih memahami dinamika kelembagaan, serta terjebak dalam sistem politik yang bersifat *top-down* di tingkat nasional, seperti yang dijalani oleh JMPPK. Di sisi lain, gerakan penolakan tambang dapat bersikap mandiri dalam menjalankan pergerakan namun kehilangan kesempatan untuk menguatkan posisinya di arena politik, seperti yang dijalani oleh LIKRA.

Penutup

Kolaborasi kuasa antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang di berbagai wilayah Indonesia memarginalisasi warga yang dirugikan oleh industri pertambangan (Puspitasari 2010; Yuwono 2010; Regus 2011; Maimunah 2014; Cahyati 2014; Arofat 2016). Sehingga warga yang menolak penambangan butuh mengembangkan strategi untuk mengintervensi arena kekuasaan, seperti aksi kolektif, advokasi dan lobi. Penelitian sebelumnya tentang gerakan penolakan tambang menguraikan adanya kontribusi aktivis NGO dalam membantu penolakan warga terhadap perusahaan tambang (Kuswardono 2014, Cahyati 2014; Dewi 2015; dan Oktaviana 2015), namun berbagai penelitian sebelumnya belum menguraikan strategi pengembangan jaringan penolakan tambang yang membuat gerakan sosial mampu bertahan lama dan menguatkan posisinya dalam bernegosiasi di arena kekuasaan.

Penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa gerakan penolakan terhadap perusahaan tambang yang dipelopori oleh JMPPK di Pegunungan Kendeng Utara mengembangkan strategi penolakan melalui penguatan relasi informal, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sehingga, meski keanggotaan JMPPK bersifat cair, gerakan penolakan tambang ini dapat mengembangkan jaringan sosial secara intensif. Di tingkat lokal, JMPPK memiliki koordinator di setiap desa Kecamatan Sukolilo, yang berperan

menyebarkan informasi terkait perkembangan gerakan penolakan tambang ke seluruh anggota JMPPK. Sementara anggota JMPPK di masing-masing desa memiliki agenda pertemuan rutin yang diisi dengan acara berdasarkan kesepakatan bersama, misalnya komunitas Simbar Wareh di Kedumulyo yang mengadakan acara tahlilan dan arisan setiap malam Jumat (Wawancara dengan DRT, 5 Desember 2015). Acara dan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa perkumpulan anggota JMPPK menjadi wadah yang memungkinkan anggota JMPPK dapat saling terhubung secara intensif dan saling membantu satu sama lain, meski bersifat informal. Kecairan relasi informal tersebut merupakan salah satu unsur utama dalam gerakan sosial yang memungkinkan beragam individu dapat saling berbagi sumber daya, tanpa harus kehilangan otonomi dan independensinya, dalam rangka mencapai tujuan bersama (della Porta dan Diani 2006: 21). Aktor-aktor yang tergabung dalam jaringan penolakan tambang memiliki kesamaan tujuan dalam menentang kesewenang-wenangan pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pengusaha tambang dalam menyingkirkan kepentingan petani lokal.[]

Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah

- Aprianto, Tri Candra. 2013. *Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep*. Jurnal Bhumi. No. 37. Hal. 157-168. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Indonesia (STPN).
- Benford, Robert D. 1997. *An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective*. Jurnal Sociological Inquiry, Vol. 67, No. 4, November, hal. 409-430. University of Texas Press
- Benford, Robert dan David Snow. 2000. *Framing Process and Social Movements: An Overview and Assesment*". Jurnal Annual Review of Sociology 26, hal. 611-639
- Diani, Mario. 1992. *The Concept of Social Movement*. Jurnal The Sociological Review. hal. 1-25.
- Diani, Mario dan Ivano Bison. 2004. *Organizations, Coalitions, and Movements*. Jurnal Theory and Society 33, hal. 281-309. Kluwer Academic Publishers.
- Escobar, Arturo. 2001. *Culture Sits in Places: Reflection on Globalism and Subaltern Strategies of Localization*. Jurnal Political Geography, Vol. 20. hal. 139-174.
- Gezon, Lisa L. 1997. *Political Ecology and Conflict in Ankarana Madagaskar*. Jurnal Ethnology, Vol. 36, No. 2. Hal. 85-100. USA: Departemen Antropologi, Universitas Pittsburgh.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2013. *Predatory Regime dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta*. Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.10, hal. 85-111. Jakarta: The Habibie Center.
- Laer, Van Jeroen dan Peter Van Aelst. 2010. *Internet and Social Movement Action Repertoires: Opportunities and Limitations*. Jurnal Information, Communication & Society, hal. 1–26. Taylor & Francis
- Lim, Merlyna. 2013. *Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia*. Jurnal Contemporary Asia, hal. 1-22. London: Routledge.
- Regus, Maximus. 2011. *Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT*. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 16, No. 1, Januari, hal. 1-25. Depok: LabSosio, FISIP UI.
- Ribot, Jesse C, dan Nancy Lee Peluso. 2003. *Theory of Access*. Jurnal Rural Sociology, Vol. 68, No. 2, hal. 153-181.
- Setiawan, Heri, Bambang Sudarsono, dan Moehammad Awaluddin. 2013. *Identifikasi Daerah Prioritas Rehabilitasi Lahan Kritis Kawasan Hutan dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Pati)*. Jurnal Geodesi, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siregar, Hendrik. 2014. *Akhiri Cara Mudah Tambang Habisi Hutan; Stop Izin Pinjam Pakai Hutan*. Jurnal Landreform, hal. 61-70. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Widiyanto, Paulus. 1983. *Samin Surontiko dan Konteksnya*. Jurnal Prisma, 8, hal. 59-67.
- Wijaya, Andrie. 2015. *Tambang, Kontributor Dominan Hilangnya Tutupan Hutan*. Jurnal Intip Hutan, hal. 11-13. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Woods, Michael. 2003. *Deconstructing Rural Protest: the Emergence of a New Social Movement*. Jurnal Rural Studies 19, hal. 309–325. Elsevier Science Ltd.

Buku

- Andika. 2014. "Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah", dalam Noer Fauzi Rahman dan Dian Yanuardy (ed.), *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014.
- Baletti, Brenda, Tamara M. Johnson and Wendy Wolford. 2009. "'Late Mobilization': Transnational Peasant Networks and Grassroots Organizing in Brazil and South Africa", dalam Saturnino M. Borras Jr, Marc Edelman dan Cristóbal Kay (Ed.). *Transnational Agrarian Movements Confronting Globalization*. Blackwell Publishing Ltd.
- Cahyati, Devy Dhian. 2014. *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik*. Yogyakarta: STPN Press.
- Castells, M., 2004. *The Information Age: Economy, Society and Culture; Volume 2: The Power of Identity*. Edisi Kedua. Malden, MA: Blackwell.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Edisi 2. London: Sage Publications.
- Della Porta, Donatella dan Mario Diani. 1999. *Social Movements: an Introduction*. Edisi Kedua. Blackwell Publishing Ltd
- Fainstein, S.S., dan Hirst, C., 1995. "Urban Social Movements". Dalam Judge, D., Stoker, G., Wolman, H. (Ed.), *Theories of Urban Politics*, hal. 181-204. London: Sage.
- Fauzi, Noer, 1999. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fauzi, Noer. 2005. *Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fauzi, Noer. 2009. "Okupasi Tanah Menuju Pembaruan Agraria: Konteks dan Konsekuensi dari Serikat Petani Pasundan (SPP) di Garut Jawa Barat", dalam Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed.) *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Franco, Jennifer C. dan Saturnino M. Borras Jr. 2009. "Paradigm Shift: The 'September Thesis' and Rebirth of the 'Open' Peasant Mass Movement in the Era of Neoliberal Globalization in the Philippines", dalam Dominique Caouette dan Sarah Turner (ed.). *Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia*. The Taylor & Francis e-Library.
- Frasetiandy, Dwitho. 2014. "Ekonomi Keruk, Krisis Sosial-Ekologis, dan Perlawanan Rakyat di Kalimantan Selatan", dalam Noer Fauzi Rahman dan Dian Yanuardy (ed.), *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014.
- Hunt, Scott A. dan Robert D. Benford. 2004. "Collective Identity, Solidarity, and Commitment". Dalam David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi (Ed.), *The Blackwell Companion to Social Movement*, hal. 433-457. Blackwell Publishing Ltd.
- Hardt, Michael dan Antonio Negri. 2004. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. New York: The Penguin Press.
- Ismail, Nawari. 2012. *Relasi Kuasa dalam Pengubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Klandermans, Bert. 2005. *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Penerjemah Helly P Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kuswardono, Torry. 2014. "Relasi Kuasa Pertambangan Mangan di Nusa Tenggara Timur", dalam Noer Fauzi Rahman dan Dian Yanuardy (ed.), *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014.
- Maimunah, Siti. 2014. *Mencari Makroman di Tanah Pinjaman: Perempuan Makroman di Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara*. Working Paper Sajogyo Institute No. 10. Bogor: Sajogyo Institute.
- Malseed, Kevin. 2009. *Where There Is No Movement: Local Resistance and the Potential for Solidarity*, dalam Saturnino M. Borras Jr, Marc Edelman dan Cristóbal Kay (Ed.). *Transnational Agrarian Movements Confronting Globalization*. Blackwell Publishing Ltd.
- Nash, June. 2005. *Defying Deterritorialization: Autonomy Movement Against Globalization*. UK: Backwell Publishing.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Peluso, Nancy Lee. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. Terjemahan Landung Simatupang. Jakarta: Konphalindo.
- Peluso, Nancy Lee, Suraya Afiff dan Noer Fauzi. 2009. "Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia", dalam Saturnino M. Borras Jr, Marc Edelman dan Cristóbal Kay (Ed.). *Transnational Agrarian Movements Confronting Globalization*. Blackwell Publishing Ltd.
- Puspitasari, Dewi Dwi. 2010. "Krisis Keberlanjutan Sumber Penghidupan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis di Pulau Kecil", dalam Laksmi A. Savitri, Ahmad Nashih Luthfi dan Amien Tohari (Ed.). *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis*, hal. 119-144. Yogyakarta: STPN Press.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, Vegitya Ramadhani Putri Muhammad Yusuf, Muhammad Bahtiar Arifin. 2014. *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Scott, James C. 1990. *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcript*. London: Yale University Press.
- Snow, David A., Sarah A. Soule, dan Hanspeter Kriesi. 2004. "Mapping the Terrain". Dalam David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi (Ed.), *The Blackwell Companion to Social Movement*, hal. 1-16. Blackwell Publishing Ltd.
- Sobirin, M. 2010. "Menjaga Air Tetap Mengalir: Politik Air dalam Skema Industrialisasi Pati Selatan", dalam Heru Prasetya dan Bosman Batubara (ed.), *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*. Depok: Desantara.
- Walker, Kathy Le Mons. 2009. "From Covert to Overt: Everyday Peasant Politics in China and the Implications for Transnational Agrarian Movements", dalam Saturnino M. Borras Jr, Marc Edelman dan Cristóbal Kay (Ed.). *Transnational Agrarian Movements Confronting Globalization*. Blackwell Publishing Ltd.

Karya Ilmiah Lainnya

- Arofah, Syiqqil. 2016. *Kontestasi Kuasa: Diskursus Sengketa Pembangunan Pabrik Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk di Rembang*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia.

- Dewi, Citra. 2015. *Analisis Gerakan Sosial di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah*. Skripsi. Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Ekawati, Sulistya, Lukas Rumboko Wibowo, Kushartati Budiningsih & Fentie Sallaka. 2014. "Mengkritisi Konsep Land Swap: Pembelajaran dari Kebijakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan". Prosiding Seminar Hasil Penelitian, *Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan yang Baik*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan
- Hakim, Ismatul & Sylviani. 2014. "Reforma Agraria Sektor Kehutanan Melalui Pengembangan Konsep Desa Hutan". Prosiding Seminar Hasil Penelitian, *Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan yang Baik*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan
- Hapsari, Dwi Retno. 2016. *Jaringan Komunikasi dalam Partisipasi Gerakan Sosial Lingkungan (Studi Pengaruh Sentralitas Jaringan terhadap Partisipasi Gerakan Sosial Tolak Pabrik Semen pada Komunitas Adat Samin di Pati Jawa Tengah)*. Disertasi. Depok: Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.
- Idhom, Addi Mawahibun. 2009. *Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen Di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
- Oktaviana, Ganies. 2015. *Analisis Konflik Sumber Daya Alam di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Studi Kasus: Rencana Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen)*. Skripsi. Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Wacana, Petrasa, Abe Rodialfalah, dan Fredy Chandra. 2008. Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati. Paper Ilmiah ISKF #1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Wacana, Petrasa, Irfianto, Abe Rodhialfalah, Sunu Widjanarko, Thomas Suryono, Fredy Chandra, Fandi Ahmad, Imron Fauzi dan Ming-Ming Lukiarti. 2014. *Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah*. Prosiding Seminar Nasional Kebumihan Ke-7, 30 - 31 Oktober 2014. Yogyakarta: Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
- Yuwono, Agust Eko. 2010. *Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Skripsi. Semarang: Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Laporan Lembaga dan Investigasi

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati. 2013. *Hasil Sensus Pertanian 2013*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Sukolilo Tahun 2016*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

- Cahyono, Eko dan Kusnadi. 2014. *Kondisi Tenurial dan Kesejahteraan Desa-desa di sekitar Pabrik Semen Indonesia Rembang*. Temuan Awal Kajian Tim Peneliti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mediasi konflik masyarakat dan PT. Semen Indonesia di Rembang.
- Kodim, Muhammad. tt. Kertas Posisi Jaringan Nasional Untuk Penolakan Semen Gresik di Pati-Jawa Tengah. "Penolakan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PT. Semen Gresik di Sukolilo, Pati" (WALHI, DESANTARA, KONTRAS, ANBTI, JATAM, ICEL, LBH Jakarta, KRUHA, HUMA, AMAN).
- Komisi Nasional HAM. 2016. *Ringkasan Eksekutif Pelestarian Ekosistem Karst dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. 2015. *Membunyikan Lonceng Kematian (Pelumpuhan Hak Atas Pangan 34.119 orang di Jawa Tengah)*. Catatan Akhir Tahun 2015. Semarang: LBH Semarang.
- Sajogyo Institute. 2015. Petisi Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan Kepada Presiden Republik Indonesia tentang Penanganan Krisis Ekologi dan Sosial di Pulau Jawa.
- Sistem Informasi Desa dan Kelurahan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Diakses pada 4 September 2016 dari <http://prodeskkel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>
- Soerono. 2008. *Kawasan Karst di Gunung Kidul dan Kearifan Lokal*. Buletin Tata Ruang, Edisi November-Desember 2008. Jakarta: Sekretariat Tim Pelaksana BKPRN
- Tim Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng. 2015. *Surat Gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014*.

Publikasi Media, Berita dan Lainnya

- Apriando, Tommy. 2016. *Soal Tambang di Kawasan Karst, Berikut Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM (Bagian 2)*. Diakses pada 2 Maret 2016 dari: <http://www.mongabay.co.id/2016/08/30/soal-tambang-di-kawasan-karst-berikut-temuan-dan-rekomendasi-komnas-ham-bagian-2/>
- Diskusi "Radikalisasi Gerakan Rakyat Kendeng Utara" dan Pembentukan KARA*. 28. September 2015. Berita. Diakses pada 2 September 2016 dari: <http://www.arahjuang.com/2015/09/28/diskusi-radikalisasi-gerakan-rakyat-kendeng-utara-dan-pembentukan-kara/>
- Hadi, Faisol dan Titis W. 2015. *Ternyata Gundulnya Gunung Kendeng Buat Wonosoco Sering Banjir*. Diakses pada 4 September 2016 dari: <http://www.murianews.com/2015/12/11/63629/ternyata-gundulnya-gunung-kendeng-buat-wonosoco-sering-banjir.html>
- Jatmiko, Bambang Priyo. 2014. *Mendorong Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melek Finansial*. Kompas Tekno, 19 Oktober 2014
- Kabar Pati. 9 September 2014. *Sidang Amdal Diwarnai Demo Ribuan Warga Tolak Pabrik Semen*. Diakses pada 2 Februari 2016 dari: <https://newkabarpati.wordpress.com/2014/09/09/sidang-amdal-diwarnai-demo-ribuan-warga-tolak-pabrik-semen/>

- Khoemaeni, Syamsul Anwar. 20 Maret 2015. Ratusan Petani & Mahasiswa Geruduk Rektorat UGM. Berita. Diakses pada 4 Juli 2016 dari: <http://news.okezone.com/read/2015/03/20/340/1121789/ratusan-petani-mahasiswa-geruduk-rektorat-ugm>
- Kompas. 17 Juli 2008. Berita. *Pabrik Semen, Warga Hilir Pegunungan Kendeng Turut Menolak*.
- Kompas. 24 April 2013. Berita. "Pemicu Banjir di Hulu".
- Kompas. 24 Februari 2014. Berita. "Penolakan Pabrik Semen Terus Menguat".
- Kompas. 28 Februari 2014. Berita. "Eksplorasi Karst Perburuk Aliran Sungai: Pemda Jangan Hanya Melihat Manfaat dari Pabrik Semen".
- Kompas. 3 Juli 2014. Berita. "Karst Rembang Bukan untuk Ditambang: Tata Ulang Industri Semen agar Sesuai Peruntukan".
- Kompas. 8 Juli 2014. Berita. "Rapat Soal Semen Buntu: Belum Ada Kajian Risiko Pendirian Pabrik".
- Kompas. 12 Agustus 2014. Berita. "Penolakan Warga Terkait Amdal Buruk".
- Kompas. 2 September 2014. Berita. "Warga Kendeng Utara Gugat SK Gubernur ke PTUN".
- Kompas. 3 September 2014. Berita. "Masyarakat Tolak Jual Tanah".
- Kompas. 4 September 2014. Berita. "Amdal Harus Bisa Diterima Masyarakat".
- Rimadi, Luqman. 2016. "MA Kabulkan PK Petani, Bagaimana Nasib Pabrik Semen di Rembang?" Berita. Liputan 6. 17 Oktober 2016. Diakses pada 4 November 2016 dari: <http://news.liputan6.com/read/2627757/ma-kabulkan-pk-petani-bagaimana-nasib-pabrik-semen-di-rembang>
- Rowiyan, Hazairin. 15 April 2015. *UGM Beri Sanksi Eko Haryono dan Heru Hendrayana*. Berita. Diakses pada 4 November 2016 dari: <http://literasi.co/2015/04/ugm-beri-sanksi-eko-haryono-dan-heru-hendrayana/>
- Roziki, Yayan Isro'. 23 Juli 2015. "Gunritno: Aksi Blokir Jalur Pantura Timur Bukan oleh JMPPK". Diakses pada 2 September 2016 dari: <http://jateng.tribunnews.com/2015/07/23/gunritno-aksi-blokir-jalur-pantura-timur-bukan-oleh-jmppk>
- Saturi, Sapariah. 2013. *Izin Tambang Karst Bertebaran, Pulau Jawa Terancam*. Diakses pada 2 Februari 2016 dari: <http://www.mongabay.co.id/2013/11/06/izin-tambang-karst-bertebaran-pulau-jawa-terancam/>
- Sobirin, Mokh. 2012. *Simbar Wareh: Bergerak di Tengah Ancaman Pemiskinan*. Diakses pada 2 September 2016 dari: <http://srinthal.org/76/simbar-wareh-bergerak-di-tengah-ancaman-pemiskinan-2/>
- Suara Merdeka. 14 April 2014. Berita. "Tahunan Belum Nikmati Hasil Tambang".
- Suara Merdeka. 24 Juli 2015. *Penolak Pabrik Semen Blokade Jalur Pantura*. Diakses pada 4 November 2016 dari: <http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/penolak-pabrik-semen-blokade-jalur-pantura/>
- Suciatiningrum, Dini. 2015. *Sigit Beberkan Misteri Kawasan Pegunungan Kendeng Utara bagi Industri*. Diakses pada 4 September 2016 dari: <http://jateng.tribunnews.com/2015/10/15/sigit-beberkan-misteri-kawasan-pegunungan-kendeng-utara-bagi-industri>
- Sutrisno. 2010. *Pandangan Masyarakat Pati Terhadap Keberadaan Hutan*. Artikel. Diakses pada 2 September 2016 dari:

<http://litbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/artikel/item/80-pandangan-masyarakat-pati-terhadap-keberadaan-hutan>

- Tim Tempo. 2015. Investigasi Majalah Tempo Edisi 7-13 September, hal. 44-59. Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk.
- Tribun. 4 September 2014. Berita. "Kami Siap Mati demi Pertahankan Sendang itu: Ribuan Warga Gelar Demo Penolakan Pabrik Semen di Pati".
- Ujiyanto, Ari. 2012. *Simbar Wareh dan Kontekstualisasi Kearifan Lingkungan*. Diakses pada 2 September 2016 dari: <http://srinthil.org/75/simbar-wareh-dan-kontekstualisasi-kearifan-lingkungan/>
- Virri, K. 2012. *Gerakan Perempuan Kendeng Menolak Pabrik Semen*. Publikasi Srinthil, Edisi 23. Diakses pada 2 Februari 2016 dari: <http://srinthil.org/77/gerakan-perempuan-kendeng-menolak-pabrik-semen/>
- Watchdoc Image. 2015. *Samin vs Semin*. Film dokumenter yang diproduksi sebagai bagian dari Ekspedisi Indonesia Biru. Diakses pada 8 April 2015 dari: https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q
- Widi, Hendriyo. 2013. *Semen Menghantui Kendeng Utara*. Kompas 02 Maret 2013, h. 24.
- Wijanarko. 2008. *Selamatkan Kars Grobogan dan Pati Jawa Tengah*. Artikel dalam Kompas, 23 April 2008.
- Yumni, Akbar. 2012. *Pengalaman Batin (Esoterik): Pengalaman Bersama Pengorganisasian*. Diakses pada 2 September 2016 dari: <http://srinthil.org/72/pengalaman-batin-esoterik-pengalaman-bersama-pengorganisasian/>